JoLSIC
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Phone: +6271-646994
E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index

Peran *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam Implikasi Pembuktian terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Megawati Atiyatunnajah[a*], Megafury Apriandhini[b], and Alvien Okta Rajasa[c]

[a]*Faculty of Fine Art and Design, Visual Communication Design, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia*
[b]*Faculty of Law, Universitas Terbuka, Indonesia*
[c]*Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*
**Corresponding author: megaatiyatunnajah@isi.ac.id*

Artikel

Keywords:
Evidence or Proof; Psychiatricum; Sexual Violence; Visum.

Riwayat Artikel
Disubmit: Apr 13, 2026;
Direview: Apr 26, 2026;
Diterima: Apr 29, 2026;
Published: Apr 30, 2026.

DOI:
https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v14i1.117421

Abstract

Sexual violence is a form of Human Rights violation, particularly in the context of higher education, which has become a prominent issue. With numerous reports from victims, it can disrupt the educational process and the mental well-being of those affected. This research is important to understand the role of visum et repertum psychiatricum as evidence in cases of sexual violence in higher education, where this issue is increasingly urgent to address. The aim of this study is to analyze how visum et repertum psychiatricum can contribute to the evidentiary process and law enforcement against perpetrators of sexual violence. The methodology used in this research is a qualitative approach, involving document analysis and interviews with legal and psychological experts. The findings indicate that visum et repertum psychiatricum holds significant power in supporting victims' claims, providing objective evidence regarding the psychological impact experienced, and assisting judges in making fair decisions. The conclusion of this study emphasizes that the integration of visum et repertum psychiatricum in legal processes is crucial to enhance the effectiveness of handling sexual violence cases in higher education and to provide better protection for victims.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan isu hukum yang semakin mendesak untuk ditangani, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap korban dan lingkungan akademis secara keseluruhan. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain (Quran, 2022a). Menurut data dari berbagai lembaga, kasus kekerasan seksual di

institusi pendidikan tinggi terus meningkat, menciptakan suatu kebutuhan mendesak untuk mekanisme pembuktian yang efektif dalam proses hukum. Salah satu alat bukti yang penting dalam kasus ini adalah *visum et repertum psychiatricum*, yang dapat memberikan bukti objektif mengenai dampak psikologis yang dialami oleh korban. Dalam konteks peradilan, pemahaman yang mendalam tentang peran visum et repertum psychiatricum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku. *Visum et repertum psychiatricum* merupakan alat bukti yang berupa laporan medis dari seorang ahli psikolog/psikiatri yang memeriksa seseorang terkait kesehatan jiwa dan mental akibat dampak dari gangguan psikologis akibat tindak kekerasan (Sobari & Nurdin, 2022). *Visum et repertum psychiatricum*, yang disusun oleh profesional di bidang psikologi atau psikiatri, dapat memberikan wawasan mendalam tentang kondisi mental korban setelah mengalami kekerasan seksual. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi juga dapat membantu dalam proses rehabilitasi korban. Dalam konteks peradilan, pemahaman yang mendalam tentang peran *visum et repertum psychiatricum* sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku.

Namun, meskipun *visum et repertum psychiatricum* memiliki potensi besar dalam mendukung klaim korban, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di pengadilan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum tentang pentingnya dokumen ini, serta stigma yang masih melekat pada isu kesehatan mental. Selain itu, penegak hukum terkadang masih menggunakan regulasi peraturan yang lama, tanpa menganalisis peraturan yang terbaru (Rudi Margono, 2026a). Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana peran *visum et repertum psychiatricum* dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini akan membahas peran *visum et repertum psychiatricum* dalam konteks kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, dengan fokus pada analisis proses pembuktian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kasus-kasus yang terjadi di Perguruan Tinggi di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam tentang apa yang dimaksud dengan *visum et repertum psychiatricum*, termasuk proses penyusunannya, serta bagaimana dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan seksual. Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup analisis beberapa studi kasus yang relevan di Perguruan Tinggi di Indonesia, untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana *visum et repertum psychiatricum* diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan integrasi visum et repertum psychiatricum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, guna memastikan keadilan bagi korban dan efektivitas penegakan hukum.

Peran *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam Implikasi Pembuktian terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sangat penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik, khususnya perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun kekerasan seksual telah lama menjadi isu yang serius, keberhasilan proses hukum seringkali terhambat bukan karena kurangnya keinginan untuk menuntut, melainkan karena ketidakmampuan dalam

mengumpulkan bukti yang kuat dan ilmiah. Di sinilah, *visum et repertum psychiatricum* sebuah dokumen medis forensik yang menilai kondisi kesehatan mental dan psikologis korban berperan krusial. Namun demikian, penelitian mengenai perannya dalam praktik penegakan hukum pidana sebagai bukti kekerasan seksual masih relatif terbatas di Indonesia. Di sisi lain, beberapa kasus menunjukkan betapa pentingnya bukti psikiatris untuk menilai kerugian psikologis yang dialami korban serta sebagai alat pembuktian yang dapat dengan mudah menggugurkan baik argumen terdakwa yang menyangkal adanya perbuatan maupun tuduhan yang menyalahkan korban. Dalam konteks pendidikan tinggi, sebagian besar korbannya adalah civitas akademik yang rentan secara psikologis dan sosial, bukti psikiatris akan membedakan pengungkapan yang sah dari pelaku yang berupaya melepaskan tanggung jawab. Selain itu, ketidaktahuan mengenai prosedur penerbitan *visum et repertum psychiatricum* di pihak tenaga medis, aparat penegak hukum, dan institusi kampus seringkali menyebabkan dokumen-dokumen tersebut tidak digunakan secara maksimal pada tahapan proses peradilan. Kajian ini menjadi sangat layak untuk ditulis karena menyadari bahwa bukti medis-psikiatrik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan alat bukti yang dapat menentukan keadilan. Selain itu, dengan adanya berbagai peraturan baru seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Penanganan Perkara Kekerasan Seksual di Pengadilan, kajian ini juga relevan secara regulasi.

Kajian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan pedoman terpadu antara pihak kampus, unit penanganan korban (UPK), dokter forensik, dan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dengan mengungkap peran strategis visum et repertum psychiatricum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembuktian, perlindungan korban, serta menegaskan komitmen perguruan tinggi terhadap keadilan dan keamanan akademik. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap dokumen ini, risiko kegagalan hukum akan terus tinggi terutama dalam kasus yang melibatkan korban dengan kecenderungan trauma, gangguan kecemasan, atau disfungsi psikologis akibat kekerasan (Febrianti dkk., 2025). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tinjauan Hukum dan Psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak korban mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus mereka di pengadilan, tetapi tidak mengkaji secara mendalam tentang penggunaan *visum et repertum psychiatricum* (NK & Farhani, 2026). Menurut Putri, A. ,Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menekankan pentingnya alat bukti dalam proses hukum, tetapi tidak membahas secara spesifik tentang *visum et repertum psychiatricum*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *visum et repertum psychiatricum* dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti di pengadilan. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi *visum et repertum psychiatricum* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, guna memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan integrasi *visum et repertum psychiatricum* dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, guna memastikan keadilan bagi korban dan efektivitas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang peran *visum et repertum psychiatricum* dalam pembuktian pada kasus yang melibatkan Kekerasan Seksual terhadap Institusi Pendidikan Tinggi Dengan demikian, peneliti dapat memahami seluruh aspek dari kasus kekerasan seksual yang tidak hanya melampaui ranah hukum, tetapi juga mencakup situasi sosial dan psikologis yang terkait dengannya. Melalui pemanfaatan teori sebagai pedoman dalam penelitian ini, fokus studi akan tertanam kuat pada realitas di lapangan. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga bersifat eksploratif, bertujuan untuk menemukan hal-hal baru terkait peran *visum et repertum psychiatricum*, khususnya dalam konteks pembuktian di pengadilan (Nurhayati dkk., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan fakta-fakta yang sudah ada, tetapi juga menggali informasi baru yang dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai bagian dari penelitian hukum, kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang memfokuskan pada analisis norma dan aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam konteks kasus kekerasan seksual (Wiraguna, 2024). Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta ketentuan lain yang relevan dengan topik kekerasan seksual dan proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang *visum et repertum psychiatricum* juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini (ULFA, 2025). Studi kasus dari beberapa putusan pengadilan yang melibatkan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti memberikan gambaran nyata tentang penerapan dokumen tersebut dalam sistem peradilan. Langkah-langkah penelitian yang diambil mencakup kajian literatur untuk memahami teori dan konsep terdahulu serta mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya. Kemudian, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, antara lain ahli psikologi dan psikiatri, pengacara, penegak hukum, serta korban kekerasan seksual. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam terkait penyusunan dan penggunaan v*isum et repertum psychiatricum* dalam proses hukum (Rifa'i dkk., 2023).

Data yang terkumpul dari studi literatur dan wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran dan tantangan dalam penggunaan *visum et repertum psychiatricum.* Penelitian ini juga memperkaya analisis dengan mengkaji beberapa kasus kekerasan seksual yang sudah diputuskan agar dapat melihat penerapan nyata dokumen tersebut sebagai alat bukti di pengadilan (Sari dkk., 2021). Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber sehingga mengurangi bias dan memperkuat temuan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran *visum et repertum psychiatricum* dalam pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan penanganan kasus

kekerasan seksual dan perlindungan korban. Selain itu, kajian ini juga dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain yang berminat untuk mengeksplorasi topik serupa di masa mendatang, sehingga turut memperkaya literatur dan praktik penanganan kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti dan manusiawi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peran *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam Proses Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Hasil penelitian mengenai peran *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks hukum dan psikologis. *Visum et Repertum Psychiatricum* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi mental korban (Werembinan & Nugroho, 2024a). Dalam banyak kasus, kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, hasil dari visum ini dapat membantu pihak berwenang untuk memahami lebih baik dampak dari tindakan kekerasan yang dialami oleh korban, serta memberikan dasar yang kuat untuk penuntutan hukum. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat meningkatkan kepercayaan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Ketika korban mengetahui bahwa ada bukti yang dapat mendukung klaim mereka, mereka cenderung merasa lebih didukung dan berdaya. Hal ini sangat penting dalam konteks perguruan tinggi, di mana stigma dan ketakutan sering kali menghalangi korban untuk berbicara. Dengan demikian, visum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan korban dan mendorong mereka untuk mencari keadilan (Rudi Margono, 2026b).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* dapat berperan dalam proses rehabilitasi korban. Dengan adanya diagnosis yang jelas mengenai kondisi mental korban, pihak berwenang dan lembaga pendidikan dapat merancang program dukungan yang lebih efektif. Ini mencakup terapi psikologis dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan individu korban. Dengan demikian, visum ini tidak hanya berkontribusi pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan psikologis korban, yang merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan mereka (Supraba, 2023). Secara keseluruhan, signifikansi dari hasil penelitian ini terletak pada kemampuan *Visum et Repertum Psychiatricum* untuk berfungsi sebagai jembatan antara aspek hukum dan kesehatan mental. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan dukungan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani isu kekerasan seksual, yang merupakan masalah serius di lingkungan pendidikan tinggi (Asmadi, 2018).

Visum et Repertum Psychiatricum memainkan peran krusial dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, terutama dalam menilai kondisi psikologis korban

dan pelaku. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti medis yang menguatkan kesaksian korban dengan memberikan analisis profesional mengenai trauma psikologis, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), serta dampak emosional lainnya. *Visum et Repertum Psychiatricum* juga membantu mengidentifikasi tanda-tanda psikopatologi pada pelaku, seperti kecenderungan agresif atau gangguan kepribadian antisosial, yang dapat mendukung proses hukum. Dalam konteks perguruan tinggi, *Visum et Repertum Psychiatricum* sering kali menjadi dasar untuk menentukan kebijakan institusional, seperti sanksi akademik atau pemutusan hubungan studi bagi pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* yang komprehensif dapat mengurangi risiko viktimisasi korban dan memastikan lingkungan kampus yang lebih aman. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya psikiater forensik yang terlatih, serta stigma sosial yang mungkin menghambat korban untuk melapor. Secara kritis, literatur juga mengidentifikasi gap penelitian terkait standardisasi *Visum et Repertum Psychiatricum* di Indonesia, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan dinamika kekuasaan di lingkungan akademik. Diperlukan lebih banyak studi longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam konteks pencegahan dan rehabilitasi, serta integrasinya dengan kebijakan kampus berbasis bukti.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Penggunaan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai Alat Bukti di Pengadilan.

Penggunaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti di pengadilan menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keadilan dalam proses hukum. Subjektivitas penilaian psikiatri menjadi salah satu isu utama, di mana hasil pemeriksaan dapat bervariasi tergantung pada keahlian dan pendekatan masing-masing psikiater. Hal ini menuntut adanya standar yang lebih konsisten dalam praktik psikiatri untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diterima secara luas di pengadilan. Perbedaan dalam standar diagnosis juga menjadi tantangan yang signifikan. Dengan adanya berbagai kriteria yang digunakan, hakim dan juri mungkin kesulitan untuk memahami dan menilai validitas hasil *visum et repertum*. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada para profesional hukum mengenai aspek-aspek kesehatan mental agar mereka dapat lebih memahami konteks dan implikasi dari hasil pemeriksaan psikiatri (LELI, 2026). Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pemeriksaan psikiatri juga menjadi kendala. Dalam banyak kasus, pengadilan memerlukan hasil yang cepat, sementara pemeriksaan psikiatri yang komprehensif memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya akurat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan hukum (Hendra dkk., 2025). Stigma terhadap gangguan mental juga berperan dalam tantangan ini. Persepsi negatif terhadap individu dengan gangguan mental dapat memengaruhi cara pandang hakim dan juri, sehingga mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan para profesional hukum dan masyarakat umum. Akhirnya, kesulitan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan psikiatri di pengadilan menjadi tantangan tersendiri. Ahli psikiatri harus mampu menjelaskan hasil dengan cara yang

jelas dan mudah dipahami, agar hakim dan juri dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam konteks ini. Tantangan dalam penggunaan *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti di pengadilan memerlukan perhatian dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk psikiater, pengacara, hakim, dan masyarakat (Mahajudin dkk., 2022). Dengan meningkatkan pemahaman dan mengurangi stigma, diharapkan penggunaan *visum et repertum* dapat lebih efektif dan adil dalam proses hukum.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus sering kali tidak terungkap dan ditangani dengan baik, sehingga menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam kasus kekerasan seksual adalah visum et repertum psychiatricum. Namun, penggunaan alat bukti ini dalam konteks perguruan tinggi masih memiliki banyak kelemahan. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan berbagai kelemahan yang ada dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan fokus pada penggunaan *visum et repertum psychiatricum.* Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Tindakan ini dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan korban secara fisik dan psikologis. Di lingkungan perguruan tinggi, kekerasan seksual sering kali terjadi dalam bentuk pelecehan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, atau bahkan pemerkosaan. *Visum et repertum psychiatricum* adalah alat bukti yang digunakan untuk menilai kondisi psikologis dan fisik korban kekerasan seksual (Quran, 2022b). Alat bukti ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, seperti dokter spesialis forensik atau psikiater. Hasil dari visum ini dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum dan juga sebagai dasar untuk memberikan perawatan yang diperlukan bagi korban.

Visum et repertum psychiatricum merupakan dokumen hasil pemeriksaan medis psikiatri yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pertanggungjawaban pidana seseorang dengan gangguan jiwa. Dokumen ini berisi catatan dan analisis profesional seorang psikiater mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang diperiksa, yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses persidangan (Rizky dkk., 2025). Meskipun secara teoritis *visum et repertum psychiatricum* diharapkan dapat memberikan panduan objektif bagi penegak hukum, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas dan kredibilitasnya di pengadilan. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek subjektivitas penilaian, keragaman standar diagnostik, keterbatasan sumber daya, stigma sosial, hambatan komunikasi ilmiah, kesulitan penentuan kausalitas, serta isu etika dan perlindungan hukum terhadap terdakwa. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti adalah sifat subjektif dari penilaian psikiatri itu sendiri. Berbeda dengan pemeriksaan medis fisik yang dapat didukung dengan hasil laboratorium atau radiologi yang objektif, pemeriksaan kejiwaan sangat bergantung pada interpretasi klinis dan pengalaman subjektif dari psikiater yang melakukan pemeriksaan. Seorang psikiater harus menganalisis gejala-gejala yang dilaporkan pasien, perilaku yang diamati, serta riwayat kehidupan yang kompleks, yang semuanya

memerlukan interpretasi profesional. Kondisi ini dapat menyebabkan *inter-rater variability* yang tinggi, di mana dua psikiater yang kompeten dapat memberikan diagnosis atau kesimpulan yang berbeda untuk kasus yang sama (Aprilyani, 2022). Dalam konteks peradilan, perbedaan pendapat antarahli ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian visum et repertum, karena pihak berwenang mungkin kesulitan menentukan pendapat mana yang lebih kredibel atau relevan dengan kasus yang sedang dihadapi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keragaman standar diagnostik yang digunakan dalam psikiatri. Di dunia internasional, terdapat setidaknya dua sistem klasifikasi gangguan mental yang dominan: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association, dan International Classification of Diseases (ICD-10) yang dikeluarkan oleh World Health Organization. Meskipun kedua sistem ini memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan dalam kriteria diagnostik, klasifikasi, dan terminologi yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan psikiatri. Perbedaan ini menjadi masalah krusial dalam konteks forensik, karena kesimpulan dalam visum et repertum psychiatricum dapat berbeda tergantung pada sistem klasifikasi yang digunakan oleh psikiater peneliti. Ketidakseragaman standar ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum yang kurang memahami nuansa perbedaan diagnostik dalam psikiatri, sehingga mengurangi nilai pembuktian dari visum itu sendiri. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pemeriksaan psikiatri forensik juga merupakan tantangan signifikan yang dihadapi dalam penggunaan visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti. Evaluasi psikiatri yang komprehensif idealnya memerlukan waktu yang cukup panjang, termasuk sesi wawancara mendalam, observasi perilaku, pemeriksaan fisik, serta analisis riwayat medis dan psikososial yang lengkap. Namun, dalam konteks hukum, seringkali terdapat tekanan waktu yang ketat karena jadwal persidangan atau batasan penahanan. Kondisi ini dapat mengakibatkan pemeriksaan yang terburu-buru dan kurang mendalam, sehingga hasil visum mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kejiwaan sebenarnya dari individu yang diperiksa. Keterbatasan jumlah psikiater forensik yang kompeten di beberapa daerah juga menjadi masalah, sehingga satu psikiater mungkin harus menangani banyak kasus sekaligus, yang berpotensi menurunkan kualitas pemeriksaan dan analisis yang dilakukan (KAHFI, 2024).

Penerimaan dan penggunaan laporan autopsi psikiatrik (*visum et repertum psychiatricum*) dalam proses hukum juga dipengaruhi oleh stigma sosial terhadap mereka yang mengalami gangguan mental. Stereotip dan Stigma Negatif Berlebihan terhadap Penderita Gangguan Mental Secara historis di banyak masyarakat termasuk di Indonesia, pandangan mengenai gangguan mental masih memiliki pandangan yang negatif. Stigma ini tidak hanya ada di masyarakat luas, tetapi dapat meluas hingga ke sistem peradilan itu sendiri; hakim, jaksa, atau pengacara dapat memiliki bias implisit terhadap mereka yang memiliki diagnosis gangguan mental. Bias ini dapat mempengaruhi penentuan kredibilitas mereka serta materialitas pembuktian dari laporan autopsi psikiatrik (visum et repertum psychiatricum). Misalnya, ketika sebuah diagnosis gangguan mental diajukan dalam sebuah penilaian, diagnosis tersebut dianggap sebagai "alasan" atau "dalih" untuk menghindari tanggung jawab pidana, alih-alih menjadi sesuatu yang sebenarnya—setiap penyakit yang benar-benar

mempengaruhi perilaku dan kemampuan kognitif seseorang. Stigma semacam ini dapat membatasi kegunaan laporan autopsi psikiatrik (*visum et repertum psychiatricum*) sebagai bukti yang berbasis sains dan objektif dalam persidangan. Tantangan lain meskipun demikian tetap penting adalah bahwa hasil penilaian psikiatrik sulit untuk disajikan di ruang sidang. Salah satu alasan mengapa hal ini tampak rumit bagi banyak kelompok di luar bidang psikiatri, termasuk namun tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang tidak memiliki latar belakang medis adalah karena bidang tersebut memiliki istilahnya sendiri. Ketika dipaksa untuk memberikan kesaksian mengenai temuan mereka sebagai saksi ahli dalam konteks ruang sidang, psikiater dapat menyampaikan bahkan pengamatan klinis yang paling esoteris ke dalam kata-kata yang terdiri dari satu atau dua suku kata bagi hakim dan juri tanpa mengorbankan integritas ilmiah dari kesimpulan mereka (Mahajudin dkk., 2022b). Kesulitan komunikasi ini dapat mengurangi dampak dari kesaksian ahli dan, pada akhirnya, mengurangi kekuatan pembuktian dari visum et repertum psychiatricum itu sendiri. Selain itu, psikiater yang tidak terbiasa dengan lingkungan pengadilan mungkin merasa tidak nyaman atau kurang efektif dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan hakim dan juri, sehingga mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai saksi ahli.

Salah satu tantangan paling krusial dalam penggunaan visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti adalah keterbatasan dalam menentukan hubungan kausalitas antara gangguan mental dengan tindakan kriminal yang didakwakan. Meskipun psikiater dapat mendiagnosis adanya gangguan mental tertentu pada seorang terdakwa, membuktikan bahwa gangguan tersebut secara langsung menyebabkan atau mempengaruhi tindakan kriminal yang dilakukan adalah masalah yang jauh lebih kompleks. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang bergantung pada kapasitas untuk memahami perbuatannya atau mengendalikan perilakunya saat tindakan tersebut dilakukan. Namun, dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan secara pasti apakah gangguan mental yang didiagnosis benar-benar menghilangkan atau mengurangi kapasitas ini. Uji hukum seperti uji M'Naghten atau aturan Durham yang digunakan di beberapa yurisdiksi untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana individu dengan gangguan jiwa sering kali sulit diterapkan secara praktis dalam konteks klinis dan forensik (Rudi Margono, 2026c). Akibatnya, visum et repertum psychiatricum mungkin memberikan informasi medis yang berharga, tetapi tidak selalu dapat menjawab pertanyaan hukum spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Di samping berbagai tantangan teknis dan klinis tersebut, terdapat juga isu etika dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam penggunaan visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti. Pemeriksaan psikiatri forensik sering kali dilakukan secara wajib berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, yang menimbulkan pertanyaan mengenai persetujuan informasi (*informed consent*) dari individu yang diperiksa. Dalam situasi seperti ini, terdakwa mungkin merasa terpaksa menjalani pemeriksaan tanpa sepenuhnya memahami hak dan konsekuensinya. Selain itu, hasil visum et repertum psychiatricum dapat dieksploitasi atau dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk mendukung argumen hukum mereka, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari terdakwa. Isu etika lainnya berkaitan dengan kerahasiaan data medis dan bagaimana informasi sensitif tentang kondisi kejiwaan seseorang

digunakan dan dibuka dalam proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Semua ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan sistem peradilan untuk mendapatkan bukti obyektif dan perlindungan hak asasi individu yang menjalani pemeriksaan psikiatri forensik.

Sebagian pihak berupaya mengatasi tantangan-tantangan yang berbeda ini, yang menuntut reformasi yang berjalan pada berbagai lini. Bagian yang integral adalah pembentukan seperangkat standar nasional untuk pelaksanaan keahlian psikiatri forensik serta penulisan visum et repertum psychiatricum. Standar-standar ini harus mencakup prosedur pemeriksaan, format pelaporan, kualifikasi psikiater forensik, dan konsistensi penegakan diagnosis. Pelatihan hukum psikiatri secara bersama diperlukan untuk meningkatkan saling pemahaman mengenai keterbatasan serta kemungkinan penerapan bukti psikiatri dalam kerangka peradilan. Psikiater forensik harus mengikuti pelatihan mengenai bagaimana menjadi saksi ahli, dan instansi penegak hukum dapat memperoleh manfaat dari prinsip-prinsip dasar diagnosis dalam psikiatri. Memberikan transparansi yang lebih besar baik dalam proses pemeriksaan maupun pelaporan juga merupakan hal yang sangat penting untuk semakin memperkuat kredibilitas dan integritas visum et repertum psychiatricum sebagai alat untuk tujuan pembuktian.

KESIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa visum et repertum psychiatricum memiliki peran penting dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dokumen ini dapat memberikan bukti objektif mengenai kondisi mental dan emosional korban, yang dapat memperkuat argumen di pengadilan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya sebagai alat bukti meliputi kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum tentang pentingnya visum ini, serta potensi bias dalam interpretasi hasilnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas *visum et repertum psychiatricum* dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik bagi para profesional di bidang hukum dan kesehatan mental. Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Meskipun visum et repertum psychiatricum dapat menjadi alat bukti yang penting dalam kasus kekerasan seksual, banyak kelemahan dalam penanganan kasus ini di perguruan tinggi yang perlu diperbaiki. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, perguruan tinggi juga perlu memperbaiki prosedur pelaporan, meningkatkan kerja sama dengan pihak berwenang, dan menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat ditangani dengan lebih baik dan korban dapat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilyani, R. (2022). Bab 6 Assessment dalam Psikologi Klinis: Interview dan Behavioral. *Psikologi Klinis*, 69.

Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 39–51.

Febrianti, A. A., Malika, A., Dinah, B. A., Fauziyah, B. A., Putri, R. D., Wanilawati, S., & Supriyadi, T. (2025). Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, *3*(4), 1006–1022.

Hendra, D., Afrita, I., & Putra, T. A. (2025). KEWENANGAN PENENTUAN STATUS GANGGUAN JIWA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(2), 534–548.

Iqbal, M., Nabillah, A. E., Radhali, R., & Rafsanjani, T. (2025). Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *7*(1), 75–93.

KAHFI, M. (2024). *KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid. Sus/2019/PN Amb)*.

LELI, Y. (2026). *KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DOKUMEN MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NONFORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn. Liw)*.

Mahajudin, M. S., Margono, H. M., Yitnamurti, S., Juniar, S., Muhdi, N., Maramis, M. M., Konginan, A., Febriyana, N., Setiawati, Y., & Yulianti, E. (2022a). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Jiwa: Pemeriksaan Psikiatri*. Airlangga University Press.

Mahajudin, M. S., Margono, H. M., Yitnamurti, S., Juniar, S., Muhdi, N., Maramis, M. M., Konginan, A., Febriyana, N., Setiawati, Y., & Yulianti, E. (2022b). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Jiwa: Pemeriksaan Psikiatri*. Airlangga University Press.

Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Quran, R. F. (2022a). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(15), 480–486.

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Rizky, A., Abdullah, S. A., Nur, F., Rosidin, A., & Dhamayanti, D. (2025). Depresi Postpartum Syndrom Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Halu Oleo Legal Research*, *7*(3), 586–606.

Rudi Margono, S. (2026a). *Korban yang Bicara-Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. PROFESOR RUDI MARGONO.

Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi penelitian hukum*.

Sobari, H., & Nurdin, M. (2022). Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(15), 276–282.